



RENCANA KERJA PERUBAHAN 2025

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT**





SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 100.3.3.2/ 824 -KUM/2025

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah selaras dengan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu penetapan Keputusan Bupati untuk menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2025 –

- 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 12);
22. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 39);
 23. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 34);
 24. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 69);
 25. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 32 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat:
- a. pendahuluan;
 - b. evaluasi renja sampai dengan triwulan I tahun berkenaan;
 - c. rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah; dan
 - d. penutup.
- KETIGA** : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagai pedoman penyusunan Perubahan Kebijakan Umum

Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
(Perubahan KUA dan PPAS) Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 30 Juni 2025

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP.19750203 199903 2 008

KATA PENGANTAR

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut dan demi kesinambungan pelaksanaan Renstra SKPD maka disusunlah Rencana Kerja (Renja) Perubahan SKPD untuk Tahun Anggaran 2025 yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra SKPD yang telah ditetapkan.

Disusunnya Renja Perubahan SKPD yaitu dalam rangka penyusunan RKPD untuk Tahun 2025 yang selanjutnya setelah melalui berbagai proses sesuai ketentuan, akan dituangkan dalam Perubahan KUA/PPAS Tahun Anggaran 2025 yang merupakan dasar dalam penyusunan RKA Perubahan SKPD. Dimana RKA Perubahan SKPD setelah melalui pembahasan oleh TAPD akan diformulasikan ke dalam RAPBD-P Tahun Anggaran 2025. Oleh karena itu, penyusunan Renja Perubahan SKPD sangatlah penting artinya dalam suatu proses perencanaan dalam rangka pencapaian visi dan misi untuk SKPD itu sendiri.

Dalam dokumen perencanaan Renja Perubahan SKPD tidak saja memuat Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam sisa tahun anggaran berjalan , namun juga memuat tentang evaluasi atas pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun sebelumnya yang telah dilaksanakan serta evaluasi dalam tahun anggaran berjalan. Dengan demikian diharapkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dapat dipecahkan dan dicarikan solusinya, sehingga sasaran dalam Renstra SKPD yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan optimal.

Pelaihari, 24 Juni 2025

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tanah Laut,



Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19680916 199010 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Triwulan I Tahun 2025.....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	13
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	16
2.4 Review terhadap Rancangan RKPD Perubahan	16
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	24
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ...	26
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	26
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	26
3.3 Program dan Kegiatan.....	27
BAB V PENUTUP.....	40
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dibahas bersama antara DPRD dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, BAB VI B menyebutkan Laporan realisasi semester pertama APBD menjadi dasar perubahan APBD. Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- A. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- B. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;
- C. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- D. Keadaan darurat; dan/atau
- E. Keadaan luar biasa.

Ketentuan Penyusunan Perubahan APBD berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, BAB VI B, yaitu:

- A. Penyusunan perubahan KUA dan Perubahan PPAS
- B. Penyusunan perubahan RKA SKPD
- C. RKA-SKPD yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan baru yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi.
- D. Verifikasi dilakukan oleh TAPD untuk menelaah kesesuaian antara perubahan RKA-SKPD dengan 11 dokumen lainnya
- E. Dalam hal hasil verifikasi TAPD terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPD melakukan penyempurnaan.
- F. Selain diverifikasi TAPD, RKA-SKPD juga direviu oleh aparat pengawas internal pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- G. PPKD menyusun rancangan Perda tentang perubahan APBD dan dokumen pendukung berdasarkan perubahan RKA-SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD.
- H. Rancangan Perda tentang Perubahan APBD memuat lampiran
- I. Dokumen pendukung terdiri atas nota keuangan dan rancanganPerkada tentang penjabaran perubahan APBD.
- J. Rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD memuat lampiran
- K. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam rancangan Perkada tentang perubahan penjabaran APBD disertai penjelasan.
- L. Penganggaran pendapatan disertai penjelasan mengenai dasar hukum pendapatan.
- M. Penganggaran belanja disertai penjelasan mengenai dasar hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, dan sumber pendanaan sub kegiatan.
- N. Penganggaran pembiayaan disertai penjelasan mengenai dasar hukum, sumber penerimaan pembiayaan untuk kelompok penerimaan pembiayaan, dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan.
- O. Rancangan Perda tentang perubahan APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada kepala daerah.
- P. Penyusunan perubahan DPA SKPD

Setelah selesai pada proses penyusunan perubahan DPA dan ditetapkan, maka selanjutnya dibuatlah Rencana Kerja (Renja) Perubahan untuk menjabarkan perubahan yang dilakukan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja-SKPD BAPENDA Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 dilandasi oleh :

- A. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang

- penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)
- B. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
 - C. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang –Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - E. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - F. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - G. Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- H. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
- I. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut
- J. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah
- K. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025;
- L. Surat Edaran Nomor 000.73/830/Bapperida/2025 tentang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan disusunnya Renja Perubahan SKPD pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah yang jelas berupa program, kegiatan dan sub kegiatan dengan target kinerjanya yang akan dilaksanakan dalam sisa satu Tahun Anggaran Perubahan, yaitu sisa Tahun Anggaran Perubahan 2025. Berdasarkan Renja Perubahan BAPENDA inilah maka nantinya akan diformulasikan dalam APBD-P Kabupaten Tanah Laut melalui mekanisme yang berlaku.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Perubahan BAPENDA Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 disajikan dalam bentuk sistematika penulisan sebagai berikut :

A. BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari uraian tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan;

B. BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Berisi tentang hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2025 sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2025, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

- C. BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Berisi uraian tentang Telaahan Kebijakan Nasional, dengan Tujuan dan Sasaran
Renja Perangkat Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
- D. BAB V PENUTUP
Berisi tentang catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak
lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Triwulan I Tahun 2025

Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah tahun 2024 terhadap pencapaian IKU Badan Pendapatan Daerah, yakni indikator “Tingkat Kemandirian Fiskal” dengan target 11,18% terealisasi diangka 9,21% atau dengan capaian kinerja 82,38% dengan melihat LRA 2024 Audited, sedangkan pada Triwulan I Tahun 2025, dengan target 11,73%, realisasi di angka 9,22% atau dengan capaian kinerja 78,60%.

Realisasi Nilai SAKIP Badan Pendapatan Daerah tahun 2024 dengan target 82,00 terealisasi diangka 81,50 atau dengan capaian kinerja 99,39%. Pada tahun 2025, berdasarkan Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024-2026, Nilai SAKIP ditargetkan 83,00.

Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah sampai Triwulan I Tahun 2025 bisa dilihat pada Tabel T-C.29.

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket		1 Paket	1 Paket	100			
5	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	3 Orang	4 Orang	4 Orang	100	4 Orang	4 Orang	100
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100		100	100	100	100	100	100
5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket	100
5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	4 Paket	9 Paket	9 Paket	100	11 Paket	11 Paket	100
5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100	2 Paket	2 Paket	100
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2 Paket	2 Paket	100	2 Paket	2 Paket	100
5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	24 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
5	02	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	3 Paket	3 Paket	100
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9 Unit	8 Unit	72 Unit	72 Unit	100	38 Unit	38 Unit	100
5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit							
5	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit							
5	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	5 Unit	9 Unit	9 Unit	100	32 Unit	32 Unit	100
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan						
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	48 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	12 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100		100	96,21	96,21	100	100	100
5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	1 Unit	100
5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	13 Unit	14 Unit	14 Unit	100	12 Unit	12 Unit	100
5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	25 Unit	44 Unit	39 Unit	88,64	41 Unit	41 Unit	100
5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit						

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	13 Unit						
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Pajak Daerah	4,43	16,10	2,60	3,28	126,14	4,52	4,52	100,00
						Persentase Peningkatan Retribusi Daerah	10,87	10,20	0,26	1066,60	410229,25	2,01	2,01	100,00
						Persentase Peningkatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7,88	9,04	82,90	22,67	27,34	4,10	4,10	100,00
						Persentase Peningkatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	12,12	6,76	4,22	-42,79	-1013,87	5,64	5,64	100,00
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Pengelolaan Pendapatan Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
5	02	04	2.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100
5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	11 Laporan	-	-	-	-	11 Laporan	11 Laporan	100
5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100
5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5	02	04	2.01	0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
5	02	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	7 Layanan	8000 Layanan	11 Layanan	11 Layanan	100	7 Layanan	7 Layanan	100
5	02	04	2.01	0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100	6 Dokumen	6 Dokumen	100
5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
5	02	04	2.01	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100	2 Laporan	2 Laporan	100
5	02	04	2.01	0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	4 Laporan					4 Laporan	4 Laporan	100

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Badan Pendapatan Daerah berdasarkan NSPK (Norma Standar Prosedur Dan Kriteria) serta IKK (Indikator Kinerja Kunci), yakni pada Indikator Kinerja Kunci “Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah” atau bisa disebut dengan “Tingkat Kemandirian Fiskal” pada tahun 2024 terealisasi 9,21%, sedangkan pada Triwulan I 2025 terealisasi di angka 9,22%. Pada indikator kinerja kunci “Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD” tahun 2024 terealisasi 11,13%, sedangkan sampai Triwulan I 2025 masih di angka 79,61%.

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 membantu Bupati dalam melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang pendapatan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-undang ini dibuat untuk melaksanakan amanat Pasal 18A ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Undang-undang ini berlandaskan pada 4 pilar utama, yakni :

- A. Mengembangkan sistem Pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien,
- B. Mengembangkan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam meminimalkan ketimpangan vertikal dan horinzontal melalui TKD (Transfer ke Daerah) dan Pembiayaan Utang Daerah
- C. Mendorong peningkatan kualitas Belanja Daerah
- D. Harmonisasi kebijakan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Daerah untuk penyelenggaraan pelayanan publik yang optimal dan kesinambungan fiskal

Otonomi Daerah diharapkan secara perlahan mampu untuk membiayai sendiri kegiatan Pemerintah Daerah, sehingga secara perlahan bantuan dari Pemerintah Pusat dapat berkurang sehingga Kemandirian Fiskal dapat terwujud. Tingkat Kemandirian Fiskal ini diperoleh dari Realisasi PAD (Pendapatan Asli Daerah) tahun berjalan dibagi Realisasi Pendapatan Daerah tahun Berjalan,

sehingga **Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah** (Tingkat Kemandirian Fiskal) inilah yang menjadi indikator kinerja Eselon II Badan Pendapatan Daerah.

Kemandirian Fiskal dalam kategori Menuju Mandiri ($25\% < - < 50\%$) harus didukung dengan Pertumbuhan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Dalam meningkatkan PAD ini, selain meningkatkan Pajak Daerah, Badan Pendapatan Daerah harus berkoodinasi dengan BPKAD, SKPD penghasil Retribusi, serta BLUD yang ada dibawah naungan Instansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Ini juga sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 118 Tahun 2023, diberi tugas yang dominan terhadap realisasi Pajak Daerah, serta adanya fungsi Retribusi Daerah berdasarkan Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Rincian capaian indikator kinerja beserta proyeksi dapat dilihat pada Tabel T-C.30.

TABEL T-C.30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun			Proyeksi	Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Tingkat Kemandirian Fiskal		Rasio PAD	8,63	8,77	11,18	11,73	8,98	9,37	9,21	9,3	
			Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	-	-	-	-	25,71	1,89	11,13	11	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Tingkat kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam menjalankan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang pendapatan dapat dikatakan cukup baik. Walaupun capaian tahun 2024 dilihat dari Indikator Renstra Badan Pendapatan Daerah 2024-2026 hampir mencapai target. Begitu juga pada Triwulan I 2025 masih belum mencapai target, namun angka nya lebih baik dari Triwulan IV 2024.

Adapun isu-isu yang ada pada tahun 2025 sampai Triwulan I yang berdampak pada Tingkat Kemandirian Fiskal, diantaranya adalah

- A. Realisasi Nilai SAKIP Badan Pendapatan Daerah di tahun 2024 di angka 81,50 sedangkan target 2025 di angka 83,00. Perlu upaya lebih dari sebelumnya untuk mencapai nilai tersebut.
- B. Tidak tercapainya realisasi Tingkat Kemandirian Fiskal di Triwulan IV 2024 dan Triwulan I 2025 berdasarkan Renstra Bapenda Tahun 2024-2026.
- C. Penerapan efisiensi dari pemerintah pusat yang berdampak pada Pendapatan Transfer,
- D. Adanya kemungkinan pemasukan Lain-Lain Pendapatan Daerah terkait usaha pertambangan,
- E. Adanya kebijakan pajak parkir dan retribusi parkir harus menggunakan karicis berporporasi, dan
- F. Implementasi tahun pertama Opsen PKB dan BBNKB dimana masih ditemui banyak warga Tanah Laut yang Tanda Nomor Kendaraan Bermotornya belum terdaftar di Pelaihari.

2.4 Review terhadap Rancangan RKPD Perubahan

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Pendapatan Daerah tahun 2025 merupakan penyesuaian rencana terhadap keadaan yang sudah berjalan agar dapat mencapai sasaran yang diharapkan. Renja Perubahan Badan Pendapatan Daerah tahun 2025 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Pada Renja Perubahan 2025 ini, Badan Pendapatan Daerah melakukan penyesuaian terhadap 18 SubKegiatan, baik menambah anggaran maupun mengurangi

anggaran. Penyesuaian ini dilakukan untuk menunjang kegiatan Badan Pendapatan Daerah untuk mencapai target.

Review terhadap Rancangan RKPD Perubahan Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel.31.

Tabel T-C.31.

Review terhadap Rancangan RKPD Perubahan tahun 2025

Kabupaten Tanah Laut

Nama Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

No	Rancangan RKPD Perubahan 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Kepuasan Sekretariat Badan Pendapatan Daerah	83	13.109.317.175	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Kepuasan Sekretariat Badan Pendapatan Daerah	83	13.109.307.175	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	11.499.193	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	11.499.193	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6.999.669	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6.999.669	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	4.499.524	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	4.499.524	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	10.753.710.596	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	10.753.710.596	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/Bulan	10.752.525.730	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang/Bulan	10.752.525.730	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	1.184.866	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	1.184.866	

No	Rancangan RKPD Perubahan 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	20.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	20.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	20.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	20.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	1.085.898.204	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	1.085.888.204	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.481.676	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.481.676	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	434.158.063	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	434.148.064	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	10.336.687	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	10.336.687	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	16.822.225	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	16.822.225	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.500.000	

No	Rancangan RKPD Perubahan 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	17.981.066	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	17.981.066	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	577.369.378	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	577.369.378	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	13.249.109	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	13.249.109	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	643.819.198	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	643.819.198	
	Pengadaan Mebel	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	38 Unit	169.383.856	Pengadaan Mebel	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	38 Unit	169.383.856	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	30 Unit	474.435.342	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	32 Unit	474.435.342	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	404.205.984	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	404.205.984	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	193.400.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	193.400.000	

No	Rancangan RKPD Perubahan 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.400.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.400.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	207.405.984	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	207.405.984	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100	190.184.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	190.184.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	20.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	20.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	140.880.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	140.880.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34 Unit	29.304.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	41 Unit	29.304.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0	

No	Rancangan RKPD Perubahan 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Persentase Peningkatan Pajak Daerah	4,00	4,52	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Persentase Peningkatan Pajak Daerah	4,52		
			Persentase Peningkatan Retribusi Daerah	100	2,01			Persentase Peningkatan Retribusi Daerah	2,01		
			Persentase Peningkatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	100	4,10			Persentase Peningkatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4,10		
			Persentase Peningkatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	100	5,64			Persentase Peningkatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5,64		
					3.839.979.772					3.839.922.885	
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase Capaian Pengelolaan Pendapatan Daerah	100	3.839.979.772	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase Capaian Pengelolaan Pendapatan Daerah	100	3.839.922.885	
	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	80.468.439	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	80.467.856	
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	11 Laporan	219.796.626	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	11 Laporan	219.796.426	
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Waiih Pajak Daerah	1 Laporan	37.365.379	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	37.355.379	
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	1.316.777.422	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	1.025.776.422	

No	Rancangan RKPD Perubahan 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 Dokumen	143.685.241	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 Dokumen	143.685.241	
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	7 Layanan	342.071.820	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	7 Layanan	342.071.820	
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	6 Dokumen	23.979.524	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	6 Dokumen	23.978.940	
	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen	1.227.552.728	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen	1.518.551.558	
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen	162.375.102	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen	162.331.753	
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Laporan	162.907.576	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Laporan	162.907.576	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Suksesnya pelaksanaan program *reward* untuk para wajib pajak daerah dan pelanggan (PBJT Makan Minum dan Jasa Hotel) di tahun 2023 dan 2024, dilanjutkan pada tahun 2025 ini. Selain itu ada juga *reward* pada PBB-P2 di tahun 2025. Pada Perubahan 2025 ini, Badan Pendapatan Daerah akan menerapkan *reward* juga pada Opsen PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) baik Roda 2 maupun roda 4. *Reward* ini diharapkan mampu meningkatkan realisasi Pajak Daerah ataupun Pendapatan Asli Daerah yang tentunya akan berdampak positif pada Tingkat Kemandirian Fiskal. Rincian bisa dilihat pada Tabel T-C.32.

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Tanah Laut

Nama Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Peningkatan Pajak Daerah	4,52	Ada Reward untuk PBJT Makan Minum, PBB-P2, dan Opsen PKB

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam menjalankan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang pendapatan, berlandaskan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Selain itu tahun 2024 sudah mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sedangkan 2 Pajak Baru, yakni Opsen PKB dan Opsen BBNKB baru dilaksanakan tahun 2025 ini.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan perangkat daerah diambil dari Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026. Ada 2 Sasaran RPD 2024-2026 yang menjadi Tujuan Badan Pendapatan Daerah, yaitu:

- A. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah
- B. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Adapun target dari tujuan Badan Pendapatan Daerah pada tahun 2025 yaitu:

Tujuan	Indikator	Target
Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	71,00
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP KABUPATEN	75,00

Dua tujuan ini memiliki masing-masing 1 Sasaran Strategis, yakni “Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah” dan “Meningkatnya Kinerja Tata Kelola Bapenda Yang Akuntabel”. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran ini, yaitu:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Tingkat Kemandirian Fiskal	11,73%
Meningkatnya Kinerja Tata Kelola Bapenda Yang Akuntabel	Nilai SAKIP Badan Pendapatan Daerah	83,00

Pada Renja Perubahan 2025, terjadi penyesuaian angka target dikarenakan perubahan pertimbangan historis yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian sasaran, sehingga angka target tidak mengikuti angka pada Renstra 2024-2026. Perubahan target ini dikarenakan realisasi Tingkat Kemandirian Fiskal pada tahun 2024 di angka 9,21%, dan Nilai SAKIP Badan Pendapatan Daerah di angka 81,50. sehingga target dirubah menjadi lebih rendah dari target Renstra 2025. Berikut ini perbandingan target Renstra di tahun 2025 dengan Target penyesuaian di Renja Perubahan 2025.

Indikator Kinerja Utama	Target Renstra 2025	Target Renja-P 2025
Tingkat Kemandirian Fiskal	11,73%	9,30%
Nilai SAKIP Badan Pendapatan Daerah	83,00	81,55

Februari tahun 2025, Pohon Kinerja kembali disusun dengan pendampingan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pohon Kinerja ini disusun sebagai dasar penyusunan Renstra Perangkat Daerah 2025-2029. Adapun Sasaran Strategis Bapenda pada Rancangan Renstra 2025-2029 yaitu “Meningkatnya PAD untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah”, sedangkan indikator dan targetnya sebagai berikut :

Sasaran Strategis Renstra 2025-2029	Indikator Kinerja Utama	Target 2025
Meningkatnya PAD untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	9,30%

3.3 Program dan Kegiatan

Hal yang menjadi pertimbangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam rumusan program dan kegiatan adalah bagaimana peningkatan Pendapatan Asli Daerah terjadi sehingga berdampak pada “Tingkat Kemandirian Fiskal” dan “Nilai SAKIP Badan Pendapatan Daerah”

Ada 2 Program yang dijalankan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut untuk merealisasikan rumusan tadi, dimana Program-program ini sesuai dengan Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024. 1 Program dijalankan untuk urusan internal Badan Pendapatan Daerah, serta 1 Program dilaksanakan kepada masyarakat di seluruh Kecamatan

yang ada di Kabupaten Tanah Laut untuk merealisasikan Pajak Daerah, dilaksanakan untuk koordinasi dengan SKPD Retribusi Daerah, dan dilaksanakan untuk merealisasikan unsur Pendapatan Daerah lainnya. 2 Program ini yaitu:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang dijalankan Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut, dimana terbagi menjadi 7 Kegiatan dan 22 Sub Kegiatan. 7 Kegiatan itu, yakni:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

B. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, yang dijalankan oleh 4 Bidang di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut, dengan 1 Kegiatan, yakni Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan 11 Sub Kegiatan, 11 Sub Kegiatan itu, yakni:

1. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
2. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
3. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
4. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
5. Penetapan Wajib Pajak Daerah
6. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
7. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
8. Penagihan Pajak Daerah
9. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
10. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah
11. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel T-C.33.

Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Tanah Laut

Nama Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5	02		KEUANGAN						16.949.230.061	16.486.106.822	
5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Sekretariat Badan Pendapatan Daerah		83	13.109.307.175			13.325.006.822	
5	02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	11.499.193		15.200.000	
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	6.999.669	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN	9.500.000
5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	4.499.524	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	5.700.000
5	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	10.753.710.596			10.367.394.854

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49 Orang/Bulan	10.752.525.730	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		10.365.894.854	
5	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang	2 Dokumen	1.184.866	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		1.500.000	
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100	20.000.000			63.000.000	
5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelenokannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelenokan	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang	0 Paket	0	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		35.000.000	
5	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Orang	20.000.000	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		28.000.000	
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	1.085.888.204			1.665.500.000	
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang	1 Paket	12.481.676	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		9.000.000	
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11 Paket	434.148.064	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		225.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	10.336.687	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		13.500.000	
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	16.822.225	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		27.500.000	
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	3.500.000	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		4.000.000	
5	02	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Paket	17.981.066	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		20.000.000	
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	577.369.378	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		1.350.000.000	
5	02	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	13.249.109	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		16.500.000	
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	643.819.198			350.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
5	02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38 Unit	169.383.856	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		180.000.000
5	02 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32 Unit	474.435.342	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		170.000.000
5	02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	404.205.984			653.911.968
5	02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang	12 Laporan	193.400.000	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		135.000.000
5	02 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	3.400.000	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		4.100.000
5	02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang	12 Laporan	207.405.984	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		514.811.968
5	02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	190.184.000			210.000.000
5	02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	20.000.000	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		25.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Unit	140.880.000	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		155.000.000	
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41 Unit	29.304.000	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		30.000.000	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Pajak Daerah		4,52	3.839.922.885			3.161.100.000	
					Persentase Peningkatan Rertribusi Daerah		2,01						
					Persentase Peningkatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		4,10						
					Persentase Peningkatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		5,64						
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Pengelolaan Pendapatan Daerah		100	3.839.922.885			3.161.100.000	
5	02	04	2.01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	80.467.856	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		102.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
5	02	04	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	162.907.576	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		126.000.000	
5	02	04	2.01	15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	122.999.914	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		175.000.000	
TOTAL									16.949.230.061			16.486.106.822	

Pada Tabel T-C.33, dapat dilihat ada perubahan pagu dari 18 sub kegiatan, hal ini karena penyesuaian dengan keadaan untuk dapat meningkatkan realisasi terhadap target. Pagu Efisiensi/Pergeseran ditambah pagu perubahan 2025 Rp 916.871.670,72, sehingga total Pagu 2025 sebesar 16.949.296.946,27. Adapun selisih pagu efisiensi/pergeseran 2025 dengan pagu perubahan 2025, yakni :

- A. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor, pagu ditambah Rp. 6.985.359,87 untuk tambahan pembelian alat listrik di kantor baru.
- B. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ditambah sebesar Rp. 263.540.000,76 untuk pembelian mesin porporasi yang dapat menunjang kebijakan penggunaan karcis pada pajak parkir dan retribusi parkir, serta pembelian running text untuk menunjang pelayanan pajak daerah.
- C. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material ditambah sebesar Rp. 2.981.065,95 untuk mendukung acara Porprov tahun 2025 ini.
- D. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, pagu ditambah Rp. 300.000.000,00 untuk mendukung Perjalanan Dinas yang dapat menunjang urusan Pendapatan Daerah di luar Kabupaten Tanah Laut.
- E. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp 384.463.635,96 untuk pembelian Gorden dan Parkir di Kantor Baru.
- F. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, pagu ditambah Rp. 69.000.000,00 untuk menunjang pembayaran listrik dan air di Kantor lama dan Kantor Baru.
- G. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, pengurangan Rp. 207.405.984,00 penyesuaian dengan jumlah Pegawai tetap yang masih ada.
- H. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, pagu ditambah Rp. 4.662.000,00 untuk pemeliharaan AC dikarenakan pindah ke Kantor Baru.
- I. Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah, pagu ditambah Rp. 1.298.079,76 untuk mendukung kunjungan ke kecamatan
- J. Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah, pagu dikurangi Rp 32.475.933,00 adalah pembelian ATK, Makan Minum Rapat, dan Biaya Iklan. Ini dikarenakan tidak akan terealisasi lagi.

- K. Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, pagu ditambah Rp. 16.950.000,41 untuk mendukung survei keberatan PBB-P2.
- L. Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah, pagu dikurangi Rp 400.314.454,46 agar efisien dan pergeseran untuk mendukung reward Opsen PKB di Sub Kegiatan Pajak Daerah
- M. Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah, pagu ditambah Rp117.597.839,63 karena penyesuaian/pergeseran kegiatan cetak SPPT di Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah.
- N. Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah pagu berkurang sebesar Rp 41.347.580,00 karena pergeseran cetak SPPT dan belanja sewa software.
- O. Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah, pagu ditambah Rp. 8.159.416,00, untuk perjalanan dinas ke kecamatan
- P. Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah, pagu ditambah Rp. 320.310.618,32 untuk reward Opsen PKB dan perjalanan dinas ke kecamatan.
- Q. Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah, pagu ditambah Rp. 52.592.374,44 untuk perjalanan dinas dalam kecamatan.
- R. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pagu ditambah Rp. 49.808.345,82 untuk perjalanan dinas dalam kecamatan.

Rencana Kerja (Renja) dan Pendanaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2025 ini sudah disesuaikan dengan kondisi yang sudah terjadi, baik Indikator Kinerja dan Pendanaan, dengan memperhatikan yang terjadi dari di Tahun 2024, dan Triwulan I tahun 2025. Pada Renja Perubahan Tahun 2025 ini, Indikator Kinerja Eselon II (Kepala Badan) ke-1, Tingkat Kemandirian Fiskal ditargetkan sebesar 9,30%, dan Indikator Kinerja Eselon II ke-2, Nilai SAKIP Badan Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar 81,55.

Indikator Kinerja Eselon III pada APBD-P Tahun 2025 sesuai dengan Peraturan Bupati yang berkaitan dengan Perubahan RKPD, berikut ini target indikator program pada Renja Perubahan 2025 yang sesuai dengan Renstra 2024-2026 :

Indikator Kinerja	Target Renstra 2025	Eselon III
Indek Kepuasan Sekretariat Badan Pendapatan Daerah	83,00	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah
Persentase Peningkatan Pajak Daerah	4,52%	Kabid Pendaftaran Pajak Daerah, Pelayanan dan Informasi, Kabid Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah, Kabid Pengendalian dan Penagihan Pajak Daerah
Persentase Peningkatan Retribusi Daerah	2,01%	Kabid Perencanaan, Pelaporan Pendapatan Daerah Dan Pembinaan Pendapatan Asli Daerah
Persentase Peningkatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4,10%	
Persentase Peningkatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5,64%	

Adapun Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan beserta Indikator Kinerjanya berdasarkan rancangan Renstra Bapenda 2025-2029, yaitu :

Sasaran Program Renstra 2025-2029	Indikator Kinerja Utama	Target 2025
Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Pajak Daerah	1,46%
Optimalnya Penerimaan Retribusi Daerah	Jumlah Retribusi Daerah	Rp 20.263.353.045,00
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kepuasan Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,55
	Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah	82,05

Sasaran Kegiatan Renstra 2025-2029	Indikator Kinerja Utama	Target 2025
Meningkatnya Kepatuhan Pembayaran Pajak Daerah	Rata-Rata Kepatuhan Pembayaran Pajak Daerah (%)	90,73%
Meningkatnya Kualitas Data Wajib Pajak Daerah	% Data Wajib Pajak Daerah Yang Lengkap Dan Akurat	0,67%
Meningkatnya Pelayanan Kepada Wajib Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,42%
Meningkatnya Ketepatan Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah	%Ketepatan Perhitungan dan Ketetapan Pajak Daerah	99,31%
Meningkatnya sinergi dengan OPD dan UPT terhadap Peningkatan Retribusi Daerah	%OPD dan UPT yang berhasil meningkatkan realisasi Retribusi Daerah	15,38%
Meningkatnya Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah	% Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%
Meningkatnya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%
Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	% Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	100%

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan (RENJA-SKPD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 merupakan rencana kerja perubahan yang tetap memperhatikan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026, dimana target tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah yang dioperasionalkan melalui P-RKPD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025.

RENJA Perubahan-SKPD pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2025 yang pendanaannya bersumber dari APBD-P Tahun 2025, dibuat dalam rangka mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi, terkait dengan isu-isu penting, yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BAPENDA Kabupaten Tanah Laut. Adapun langkah-langkah untuk pelaksanaan RENJA Perubahan Badan Pendapatan Daerah, yaitu

- A. Renja Perubahan di dalam proses penyusunannya berpedoman/memperhatikan dokumen perencanaan di atasnya (Renstra SKPD, Renstra Kabupaten Tanah Laut).
- B. Renja Perubahan Badan Pendapatan Daerah tahun 2025, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu.
- C. Renja Perubahan Badan Pendapatan Daerah 2025 memfokuskan pada pencapaian target dari indikator kinerja.
- D. Dalam melaksanakan kegiatan di tahun anggaran diharapkan tetap berpedoman pada peraturan perundangan yang berkaitan.

Dengan adanya RENJA PERUBAHAN Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2025 ini, diharapkan akan lebih terkoordinasi dan sinergis dalam pencapaian terhadap target Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Pelaihari, 24 Juni 2025

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tanah Laut,



Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19680916 199010 1 001

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**REKAPITULASI
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

**Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan**

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													
				Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1							
					Sebelum						Sesudah						
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)		
Badan Pendapatan Daerah																	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												Rp. 16.486.106.822,00
5	02				KEUANGAN												Rp. 16.486.106.822,00
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												Rp. 13.325.006.822,00
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												Rp. 15.200.000,00
5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	- Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa										Rp. 9.500.000,00
5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	- Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa										Rp. 5.700.000,00
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												Rp. 10.367.394.854,00
5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - Dana Bagi Hasil (DBH) - Dana Alokasi Umum (DAU) - DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	- Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa										Rp. 10.365.894.854,00
5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa										Rp. 1.500.000,00
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												Rp. 63.000.000,00
5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa										Rp. 35.000.000,00
5	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa										Rp. 28.000.000,00
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah												Rp. 1.665.500.000,00
5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa										Rp. 9.000.000,00
5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa										Rp. 225.000.000,00
5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa										Rp. 13.500.000,00
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa										Rp. 27.500.000,00

**Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan**

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										Tahun + 1		
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1						
									Sebelum						Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer	Jumlah (Rp)
5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 3.500.000					Rp. 3.500.000	Rp. 3.500.000				Rp. 3.500.000	Rp. 4.000.000,00
5	02	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 15.000.000					Rp. 15.000.000	Rp. 17.981.066				Rp. 17.981.066	Rp. 20.000.000,00
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 559.497.378					Rp. 559.497.378	Rp. 577.369.378				Rp. 577.369.378	Rp. 1.350.000.000,00
5	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Rp. 13.249.109				Rp. 13.249.109		Rp. 13.249.109			Rp. 13.249.109	Rp. 16.500.000,00
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp. 4.627.468	Rp. 254.728.094				Rp. 259.355.562	Rp. 4.627.468	Rp. 639.191.730			Rp. 643.819.198	Rp. 350.000.000,00
5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Rp. 169.383.856				Rp. 169.383.856		Rp. 169.383.856			Rp. 169.383.856	Rp. 180.000.000,00
5	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 4.627.468	Rp. 85.344.238				Rp. 89.971.706	Rp. 4.627.468	Rp. 469.807.874			Rp. 474.435.342	Rp. 170.000.000,00
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 542.611.968					Rp. 542.611.968	Rp. 404.205.984				Rp. 404.205.984	Rp. 653.911.968,00
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 124.400.000					Rp. 124.400.000	Rp. 193.400.000				Rp. 193.400.000	Rp. 135.000.000,00
5	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 3.400.000					Rp. 3.400.000	Rp. 3.400.000				Rp. 3.400.000	Rp. 4.100.000,00
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 414.811.968					Rp. 414.811.968	Rp. 207.405.984				Rp. 207.405.984	Rp. 514.811.968,00
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 185.522.000					Rp. 185.522.000	Rp. 190.184.000				Rp. 190.184.000	Rp. 210.000.000,00
5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Dana Bagi Hasil (DBH)	- Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 20.000.000					Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000				Rp. 20.000.000	Rp. 25.000.000,00
5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Dana Bagi Hasil (DBH)	- Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 140.880.000					Rp. 140.880.000	Rp. 140.880.000				Rp. 140.880.000	Rp. 155.000.000,00
5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Dana Bagi Hasil (DBH)	- Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 24.642.000					Rp. 24.642.000	Rp. 29.304.000				Rp. 29.304.000	Rp. 30.000.000,00
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				Rp. 3.806.829.817	Rp. 260.239.500				Rp. 4.067.069.317	Rp. 3.524.183.385	Rp. 315.739.500			Rp. 3.839.922.885	Rp. 3.161.100.000,00
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				Rp. 3.806.829.817	Rp. 260.239.500				Rp. 4.067.069.317	Rp. 3.524.183.385	Rp. 315.739.500			Rp. 3.839.922.885	Rp. 3.161.100.000,00
5	02	04	2.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	- Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 83.959.775					Rp. 83.959.775	Rp. 80.467.856				Rp. 80.467.856	Rp. 102.000.000,00
5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	- Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 254.812.143	Rp. 60.239.700				Rp. 315.051.843	Rp. 159.556.726	Rp. 60.239.700			Rp. 219.796.426	Rp. 135.000.000,00
5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	- Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 34.005.379					Rp. 34.005.379	Rp. 37.355.379				Rp. 37.355.379	Rp. 72.300.000,00
5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	- Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.590.366.532					Rp. 1.590.366.532	Rp. 1.025.776.422				Rp. 1.025.776.422	Rp. 943.600.000,00
5	02	04	2.01	0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	- Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 34.987.401					Rp. 34.987.401	Rp. 143.685.241				Rp. 143.685.241	Rp. 65.400.000,00

**Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan**

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Tahun - 1	Jumlah										Tahun + 1			
					Tahun N					Jumlah (Rp)	Tahun N					Jumlah (Rp)		
					Sebelum				Setelah									
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Belanja Operasi		Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer					
5	02	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	- Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 191.999.600	Rp. 199.999.800			Rp. 391.999.400	Rp. 142.072.020	Rp. 199.999.800			Rp. 342.071.820	Rp. 313.600.000,00
5	02	04	2.01	0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	- Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 17.989.524				Rp. 17.989.524	Rp. 23.978.940				Rp. 23.978.940	Rp. 26.700.000,00
5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah	- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	- Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 1.223.630.940				Rp. 1.223.630.940	Rp. 1.518.551.558				Rp. 1.518.551.558	Rp. 1.065.000.000,00
5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	- Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 132.679.378				Rp. 132.679.378	Rp. 162.331.753				Rp. 162.331.753	Rp. 136.500.000,00
5	02	04	2.01	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	- Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 119.399.230				Rp. 119.399.230	Rp. 107.407.576	Rp. 55.500.000			Rp. 162.907.576	Rp. 126.000.000,00
5	02	04	2.01	0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	- Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 122.999.915				Rp. 122.999.915	Rp. 122.999.914				Rp. 122.999.914	Rp. 175.000.000,00
Jumlah								Rp. 15.368.082.833	Rp. 632.386.409			Rp. 16.000.469.242	Rp. 15.613.330.016	Rp. 1.336.900.045			Rp. 16.949.230.061	Rp. 16.486.106.822,00

Kab. Tanah Laut, ...
Kantor Bupati Pendapatan Daerah



**CATATAN HASIL REVIU RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN ANGGARAN 2025**

Inspektorat Kabupaten Tanah Laut	Disusun oleh/Tanggal	Ir. Hj. Nurhidayati, MM 18 Juni 2025
	Direviu dan Disetujui oleh/Tanggal	Ina Gantiani, S.IP, MM 18 Juni 2025
Catatan Hasil Reviu Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025		

Sehubungan dengan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor 800.1.11.1/253/Insp/2025 tanggal 17 Juni 2025 untuk melaksanakan reviu atas Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025, bersama ini kami sampaikan catatan hasil reviu sebagai berikut :

A. Data Umum

1. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen rencana kerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya guna mengoperasionalkan rencana strategis jangka menengah (Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026).
2. Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 disusun dengan sistematika terdiri dari:
 - a. BAB I. Pendahuluan
 - b. BAB II. Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
 - c. BAB III. Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah
 - d. BAB IV. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah
 - e. BAB V. Penutup
3. Berdasarkan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut melakukan perubahan sebanyak 2 (dua) Program, 8 (delapan) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan.

B. Catatan Hasil Reviu

Berdasarkan hasil reviu atas Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 ada beberapa hal yang menjadi catatan yaitu :

1. Pengujian Atas Kesesuaian Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

a. Kelengkapan Dokumen

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut telah melengkapi dokumen pendukung kegiatan reviu Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, yakni :

- 1) Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut periode 2024-2026;
- 2) Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025;

b. Kesesuaian pencantuman target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Berdasarkan pengujian atas kesesuaian pencantuman target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut :

Rancangan Akhir Renja PD Tahun 2025			RKPD Tahun 2025			
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja pd Lampiran BAB IV)	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (RKPD pd Lampiran BAB V)	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Keterangan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Nilai Indeks Kepuasan Sekretariat Badan Pendapatan Daerah</i>	82,05 Nilai	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Nilai Indeks Kepuasan Sekretariat Badan Pendapatan Daerah</i>	83 Nilai	Target kinerja Renja tidak sama dengan RKPD
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	100 %	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	100 %	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	7 Dokumen	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	6 Dokumen	Indikator kinerja Renja tidak sama dengan RKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	4 Laporan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	2	Indikator kinerja Renja tidak sama dengan RKPD
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	<i>Persentase peningkatan pajak daerah Persentase peningkatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan</i>	0,11 % 1,5 %	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	<i>Persentase peningkatan pajak daerah Persentase peningkatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan</i>	4,52 % 4,10 %	Target kinerja Renja tidak sama dengan RKPD
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	<i>Persentase Capaian Pengelolaan Pendapatan Daerah</i>	100 %	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	<i>Persentase Capaian Pengelolaan Pendapatan Daerah</i>	100 %	
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Penetapan Wajib Pajak Daerah	4 Dokumen	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Penetapan Wajib Pajak Daerah	1 Dokumen	Target kinerja Renja tidak sama dengan RKPD

Rancangan Akhir Renja PD Tahun 2025			RKPD Tahun 2025			
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja pd Lampiran BAB IV)	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (RKPD pd Lampiran BAB V)	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Keterangan
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	<i>Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah</i>	8000 Layanan	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	<i>Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah</i>	7 Layanan	Target kinerja Renja tidak sama dengan RKPD

- c. Pemanfaatan Pohon Kinerja dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pohon kinerja yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut belum semua dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen perubahan rencana kerja perangkat daerah Tahun 2025, kinerja dan indikator dalam pohon kinerja belum tergambar dalam dokumen rencana kerja perangkat daerah Tahun 2025 baik pada program maupun kegiatan.
2. Pengujian Atas Penyusunan Substansi Antar BAB Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025.
 - a. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 belum mengacu pada Surat Edaran Bupati Tanah Laut Nomor 000.73/830/Bapperida/2025 tentang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sehingga Pengujian atas penyusunan substansi antar BAB Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 tidak dapat dilakukan.
 - b. Kesesuaian Rancangan Akhir Renja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dengan Surat Edaran Bupati Tanah Laut Nomor 000.73/830/Bapperida/2025 tentang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.
Berdasarkan pengujian atas kesesuaian rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 dengan Surat Edaran Bupati Tanah Laut Nomor 000.73/830/Bapperida/2025 tentang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025. sebagai berikut :

Renja PD Tahun 2025	Surat Edaran Bupati Tanah Laut Nomor 000.73/830/Bapperida/2025	Catatan Reviu		
		Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan
BAB I. PENDAHULUAN	BAB I. PENDAHULUAN	√		
1.1. Latar Belakang	1.1. Latar Belakang		√	Belum Menjelaskan mengenai gambaran penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah. Mengemukakan pengertian ringkas tentang perubahan Renja Perangkat Daerah serta alasan dilakukannya perubahan Renja, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara perubahan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perubahan RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan perubahan Renja K/L dan perubahan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan perubahan RAPBD.
1.2 Landasan Hukum	1.2 Landasan Hukum	√		pada landasan hukum ada peraturan tentang perpustakaan (C) dan kearsipan (D)
1.3 Maksud dan Tujuan	1.3 Maksud dan Tujuan	√		
1.4 Sistematika Penulisan	1.4 Sistematika Penulisan	√		
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025	BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN	√		
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Triwulan I Tahun 2025 Renstra	2.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan		√	Belum menyajikan Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
	2.2 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;		√	Belum menyajikan Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	2.3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;		√	Belum menyajikan Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
<i>Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel T-C.30 (tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah)</i>	2.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;		√	Belum menyajikan Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

Renja PD Tahun 2025	Surat Edaran Bupati Tanah Laut Nomor 000.73/830/Bapperida/2025	Catatan Reviu		
		Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	2.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan		√	Belum menyajikan Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan
2.4 Review terhadap Rancangan Awal Renja	2.6 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.		√	Belum menyajikan Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	<i>Tambahkan tabel Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Triwulan I Tahun 2025 yang dapat di download dari aplikasi SIMONEV</i>			
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	BAB III. .RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH		√	BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH, tidak perlu disajikan sesuai dengan SE Bupati Tanah Laut Nomor 000.73/830/Bapperida/2025 Tentang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	3.1 Perubahan Indikator Kinerja		√	Perubahan Indikator Kinerja tidak disajikan pada BAB III
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	3.2 Jumlah program dan jumlah kegiatan.		√	Jumlah program dan jumlah kegiatan. tidak disajikan pada BAB III
	3.3 Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.		√	Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya. tidak disajikan pada BAB III
	3.4 Alasan dilakukan perubahan		√	Belum disajikan
	<i>Lampirkan tabel sebagaimana hasil laporan Renja perubahan pada SIPD</i>			
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH			√	Disajikan pada BAB III
4.1 Program dan Kegiatan			√	Disajikan pada BAB III
BAB V. PENUTUP	BAB IV. PENUTUP		√	Belum menyajikan: a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

Renja PD Tahun 2025	Surat Edaran Bupati Tanah Laut Nomor 000.73/830/Bapperida/2025	Catatan Reviu		
		Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan
				b.Kaidah-kaidah pelaksanaan. c.Rencana tindak lanjut.
	4.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan		√	
	4,2 Kaidah-kaidah pelaksanaan		√	
	4.3 Rencana tindak lanjut.		√	
	<i>Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama SKPD dan nama dan tanda tangan kepala SKPD, serta cap SKPD bersangkutan</i>		√	

C. Rekomendasi

Sehubungan dengan hasil reviu diatas direkomendasikan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut agar dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah memperhatikan catatan hasil reviu diatas dengan :


1. Mepedomani Surat Edaran Bupati Tanah Laut Nomor 000.73/830/Bapperida/2025 tentang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
2. Memanfaatkan pohon kinerja yang telah disusun dengan menuangkan ke dalam dokumen perencanaan.
3. Target kinerja pada rancangan akhir perubahan renja 2025 agar disesuaikan dengan target kinerja pada perubahan RKPD tahun 2025;
4. Berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam penyusunan perbaikan Perubahan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2025;
5. Kedepannya saat menyampaikan Permohonan Reviu Rencana Kerja (Renja) agar melampirkan dokumen hasil verifikasi Rancangan Awal dan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah.

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tanah Laut


Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680916 199010 1 001

Pelaihari, 18 Juni 2025

Wakil Penanggung Jawab


INA GANTIANI, S.IP, MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19711122 199103 2 004